



ANALISIS STRATEGI DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PENGELOLAAN INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT DI INDONESIA

Lutfiyanti¹, Ayi Siti Ainun²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

e-mail: luluyanti120@gmail.com¹, ainunjarah0509@gmail.com²

Accepted: 23/12/2024; **Published:** 26/12/2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengelola inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat di Indonesia. Inflasi dan daya beli saling berkaitan, dengan menjaga inflasi tetap stabil, harga barang dan jasa terjaga, dan daya beli masyarakat yang meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Penelitian pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*), Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*. Berdasarkan hasil penelitian ini didapat bahwa Indonesia mengalami inflasi 5,51% sepanjang 2022. Sepanjang tahun 2022 tercatat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, yakni 15,26% dengan andil 1,84%. Sedangkan kontribusi Konsumsi Rumah Tangga menurun diangka 51,7% bandingkan tahun 2021 sebesar 52,9%. Pemerintah saat ini sedang terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia melalui kebijakan-kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi ini.

Kata Kunci: Inflasi, Daya beli, Kebijakan Moneter

ABSTRACT

This study aims to analyze how the strategies and monetary policies implemented by Bank Indonesia in managing inflation and increasing people's purchasing power in Indonesia. Inflation and purchasing power are interrelated, by keeping inflation stable, prices for goods and services maintained, and people's purchasing power increasing so as to encourage Indonesia's sustainable economic growth. The research in this article uses library research, while the data used is secondary data obtained from several sources, including the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia and the Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Based on the results of this study, it was found that Indonesia will experience 5.51% inflation throughout 2022. Throughout 2022, the highest inflation was recorded in the transportation expenditure group, namely 15.26% with a share of 1.84%. Meanwhile, the contribution of household consumption decreased to 51.7% compared to 2021 of 52.9%. The government is currently continuing to coordinate with Bank Indonesia through monetary policies to control this inflation.

Keywords: Inflation, Purchasing Power, Monetary Policy

PENDAHULUAN

Pada umumnya setiap perekonomian dalam suatu Negara selalu ingin mewujudkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi bagi masyarakatnya yang ditandai dengan kestabilan perekonomiannya. Stabilitas perekonomian diperlukan guna menjaga pendapatan masyarakat dan tidak tergerus oleh kenaikan harga (inflasi). Suatu negara dari waktu ke waktu juga ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan mantap. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan ke arah positif, dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2022 yang menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31% dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan drastis diangka -2,07% diakibatkan pandemi Covid-19, dan kembali tumbuh diangka 3,70% pada tahun 2021 (Data BPS). Namun, disisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik, masalah makro ekonomi seperti inflasi mencuat menjadi tantangan fundamental yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Pecahnya perang antara Rusia-Ukraina memicu krisis pangan dan energi yang pada akhirnya menyebabkan lonjakan inflasi di berbagai negara termasuk di negara Indonesia (Budihardjo dkk, 2023).

Dalam perekonomian modern, target inflasi adalah sasaran inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah. Pemerintah menetapkan target inflasi berdasarkan UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999. Dalam nota kesepahaman antara pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tiga tahun ke depan berdasarkan PMK Sasaran Inflasi No.101/PMK.010/2021. Perkiraan pemerintah untuk periode 2022–2024 adalah 3,0%, 3,0% dan 2,5%, keduanya dalam kisaran $\pm 1\%$ (BI, 2022). Pada saat yang sama, inflasi dapat dipengaruhi oleh faktor atau guncangan sisi penawaran, seperti kenaikan harga minyak dunia dan kegagalan atau banjir. Bagian dari inflasi dalam keranjang indeks harga konsumen diwakili oleh kelompok harga pangan dan administrasi, yang bervariasi akibat dampak dari faktor kejutan dan mencakup sekitar 40% dari bobot indeks harga konsumen (Triwahyuni, 2021).

Di Indonesia, Bank Indonesia bertugas mengatur dan menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan inflasi. Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter seperti penetapan suku bunga dan penguatan kebijakan pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi. Pada saat yang sama, pemerintah berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal. Pengendalian inflasi sangat penting untuk menjadi perhatian masyarakat. Inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan, yaitu menjadi tidak seimbang, yang mengurangi tabungan domestik, yang merupakan sumber investasi bagi negara-negara berkembang, dan inflasi juga dapat menyebabkan peningkatan defisit perdagangan dan utang luar negeri. Selain itu, efek yang ditimbulkan oleh inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi biasanya menghasilkan biaya sosial yang lebih tinggi dari rata-rata yang harus ditanggung warga negara. Inflasi memiliki efek negatif pada distribusi pendapatan. Depresiasi dan pendapatan bunga terbebani oleh inflasi yang menyebabkan penurunan daya beli (Nugroho & Utomo, 2022).

Salah satu kebijakan yang efektif untuk mengatasi kondisi ekonomi negara yang tidak stabil adalah kebijakan moneter. Stabilitas ekonomi negara tercermin dari stabilitas harga dalam arti tidak terjadi fluktuasi harga yang besar yang dapat merugikan masyarakat baik konsumen maupun produsen dan merusak sendi-sendi perekonomian. Selain inflasi, daya beli masyarakat berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional (Hidayat, 2023). Oleh karenanya perlu adanya koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan keseimbangan antara mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Strategi dan kebijakan moneter yang tepat dapat membantu mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan menjaga inflasi tetap stabil, harga barang dan jasa terjaga, dan

daya beli masyarakat yang meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan (Triwahyuni, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana strategi dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengelola inflasi dan meningkat daya beli masyarakat di Indonesia. Dengan demikian hasil dari analisis ini dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kebijakan moneter yang dilakukan, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan moneter di masa depan untuk mengelola inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan metode pencarian dan penyusunan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel dan kajian. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara kritis dan komprehensif untuk mendukung usulan dan gagasan (Adlini, 2022). Sedangkan data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inflasi dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia

Inflasi merupakan suatu permasalahan klasik dalam suatu perekonomian yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan riil masyarakat yang secara berkelanjutan mempunyai dampak negatif dalam perekonomian makro (Santosa, 2017). Inflasi adalah salah satu efek dari krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dapat melanda suatu negara. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kenaikan harga tajam yang terus menerus selama periode waktu (Mahendra, 2016).

Lonjakan inflasi yang terjadi di 2022 ini dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM pada awal September 2022 yang mencapai puncaknya 5,95% (yoy). Namun Bank Indonesia mencatat inflasi pasca kenaikan BBM menunjukkan tren terkendali, terlihat dari ekspektasi dan tekanan inflasi yang kembali menurun diakhir tahun 2022 (Gambar 1). Pada Desember 2022 menunjukkan inflasi dipengaruhi oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran (Gambar 2).

Gambar 1
Tren Inflasi Sepanjang Tahun Kalender 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Gambar 2
Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Desember 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti pada gambar 1 menjelaskan Indonesia mengalami inflasi 5,51% sepanjang 2022. Sepanjang tahun 2022 tercatat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, yakni 15,26% dengan andil 1,84%. Kemudian kelompok pengeluaran perawatan pribadi mengalami inflasi 5,91% dengan andil 0,37%; kelompok makanan, minuman, dan tembakau 5,83% dengan andil 1,51%; serta kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman/restoran 4,49% dengan andil 0,4%. Adapun kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,36% dengan andil 0,02% (BPS, 2023),

Tekanan inflasi meningkat akibat tingginya harga energi dan bahan pangan di pasar dunia serta dampak dari perubahan harga BBM di dalam negeri. Pada Agustus 2022, inflasi indeks harga konsumen (IHK) sebesar 4,69% (yoy), juga inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) meningkat sebesar 6,84% (yoy), dan inflasi inti sebesar 3,04% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok pangan menurun sebesar 8,93% (yoy) karena meningkatnya pasokan dari sentra-sentra industri pengolahan. Tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat akibat dari penyesuaian harga BBM bersubsidi yang menyebabkan tingginya harga energi dan pangan global. Peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi diperkirakan sebagai dampak dari kenaikan harga BBM lanjutan dan menguatnya tekanan inflasi permintaan. Perkembangan tersebut diperkirakan akan mendorong inflasi melebihi batas atas $3,0 \pm 1\%$ pada tahun 2022, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta Bank Indonesia di sisi permintaan dan penawaran untuk memastikan inflasi akan kembali ke tujuannya pada paruh kedua tahun 2023 (BI, 2022).

Dr. Supawi Pawengan menjelaskan bahwa daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Daya beli dikatakan meningkat jika kemampuan membeli barang dan jasa lebih tinggi dari periode sebelumnya, sebaliknya daya beli dikatakan menurun jika kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa lebih rendah dari periode sebelumnya (Yuniati & Amini, 2020). Dapat disimpulkan bahwa daya beli merupakan kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang dan jasa dengan uang yang dimilikinya. Jika harga barang dan jasa naik, maka uang yang dimiliki oleh masyarakat akan lebih sedikit nilainya sehingga masyarakat akan lebih sulit membeli barang dan jasa yang sama seperti sebelumnya. Maka dalam kasus ini daya beli masyarakat akan menurun.

Mengacu dari data BPS mengenai Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara akumulatif tahun 2022 yang mengalami kenaikan sebesar 5,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada kuartal IV/2022 menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01%. Menurut Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) Tauhid Ahmad, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2022

tersebut akan memberikan dampak besar terhadap kuartal I/2023, dilihat dari inflasi pada Januari 2023 yang masih tinggi 5,28%, konsumsi rumah tangga hanya sebesar 4,93% pada kuartal IV/2022 karena efek kenaikan BBM (Data BPS).

Gambar 3
Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2022

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Nilai	Kontribusi
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	1065132.09	40.32
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	85417.00	3.23
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	332716.95	12.59
d. Kesehatan dan Pendidikan	182097.43	6.89
e. Transportasi dan Komunikasi	590721.29	22.36
f. Restoran dan Hotel	263957.73	9.99
g. Lainnya	121846.41	4.61

- Pendapatan dialokasikan paling besar untuk mengkonsumsi makanan dan minuman (non durable goods)
- Pengeluaran besar lainnya untuk transportasi dan komunikasi sebagai dampak kenaikan harga BBM

Sumber: BPS, diolah, 2023

INDEF ©2023 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It cannot be retransmitted, stored, or distributed in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of INDEF. Document Classification: INDEF Confidential

zoom

Sumber : *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 2023*

Pengaruh inflasi yang tinggi memicu tekanan daya beli masyarakat yang meningkat. Dapat dilihat dari kontribusi Konsumsi Rumah Tangga terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2022 yang menurun diangka 51,7% bandingkan tahun 2021 sebesar 52,9% (Data BPS). Hal ini dikarenakan sebagian besar pendapatan masyarakat dibelanjakan untuk kebutuhan habis pakai seperti makanan, minuman, keperluan rumah tangga. Dan hanya sedikit pendapatan masyarakat yang digunakan untuk keperluan kesehatan dan pendidikan yaitu 6,89% dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Karena itu, daya beli masyarakat di Indonesia menjadi menurun atau rendah (Gambar 3).

2. Kebijakan Moneter untuk Mengendalikan Inflasi

Kebijakan moneter pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, yang dilaksanakan oleh lembaga moneter atau bank sentral berupa pengendalian jumlah uang untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Bank Indonesia). Dalam prakteknya, keseimbangan kegiatan ekonomi tersebut adalah mencapai stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga yaitu rendahnya laju inflasi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi atau output riil negara, serta tersedianya kesempatan kerja yang luas (Warjiyo, 2017).

Strategi kebijakan moneter yang dilakukan setiap negara berbeda-beda. Penetapan strategi kebijakan moneter dilakukan dengan merespons kondisi yang sedang terjadi, dan lebih mendasarkan pada evaluasi dari waktu ke waktu dengan memperhitungkan kondisi yang sedang berlangsung. Menurut Fitriyani, dkk (2023) menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi di Indonesia adalah inflasi aktual tidak dapat mencapai target inflasi yang akibatnya muncul deviasi antara inflasi aktual dengan target inflasi. Jika permasalahan ini tidak dapat diatasi maka akan menyebabkan permasalahan baru, seperti penurunan daya beli masyarakat karena harga komoditas yang meningkat namun tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan nominal, melebarnya kesenjangan pendapatan masyarakat, menghambat investasi produktif, dan mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung karena masyarakat hanya berorientasi pada konsumsi.

Melihat perkembangannya, pasca krisis keuangan global 2008/2009 Bank Indonesia mengubah tujuan *Inflation Targeting Framework (ITF)* menjadi flexible ITF. Tujuan dari penerapan ITF yang fleksibel ini adalah untuk mengubah inflasi yang disebabkan oleh *backward looking expectation* menjadi *forward looking expectation*. Secara historis, kondisi

ekonomi global telah menimbulkan banyak guncangan negatif terhadap inflasi Indonesia selama dua dekade terakhir, mulai dari krisis global 2008-2009, krisis utang luar negeri 2010-2012, penyesuaian harga komoditas global 2014-2016, dan pandemi Covid-19 tahun 2019 hingga sekarang dan perang antara Rusia dan Ukraina yang memengaruhi perekonomian banyak negara di dunia (Fitriyani dkk, 2023).

Pemerintah menggunakan kebijakan moneter yaitu stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme transmisi kebijakan moneter beserta instrumen yang akan digunakan (Fauziah, 2015). Bank Sentral atau Bank Indonesia melaksanakan jalur transmisi inflasi kebijakan moneter di Indonesia melalui beberapa jalur kebijakan yang mengarah pada isu-isu jangka panjang yang dapat memberikan multiplier effect antara lain jalur suku bunga kredit, nilai tukar rupiah, kredit konsumen, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi (Bank Indonesia, 2022).

Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat melakukan tindakan berupa mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, karena hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi. Kebijakan moneter berikut dapat memecahkan masalah inflasi:

a. Politik diskonto (*Discount Policy*)

Politik diskonto merupakan salah satu jenis kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, maka dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan politik diskonto yang perlu dikeluarkan oleh bank sentral adalah menaikkan tingkat suku bunga.

b. Politik pasar terbuka (*Open Market Policy*)

Politik pasar terbuka adalah kebijakan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan surat berharga yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Dengan kebijakan ini, bank sentral secara aktif membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat bunga tetap, sehingga jual beli surat berharga tersebut mempengaruhi jumlah uang yang beredar.

c. Politik Pembatasan Kredit (*Plafon Credit Policy*)

Politik pembatasan kredit adalah kebijakan yang membatasi pinjaman atau pemberian kredit kepada masyarakat. Politik ini dapat dilakukan dengan cara memilih atau menyeleksi untuk menentukan mana yang sangat memerlukan. Kredit yang diberikan lebih dahulu ditentukan pembatasan banyaknya kredit (kuantitas) dan sifat kredit (kualitas).

d. Politik Uang Ketat (*Tight Money Policy*)

Kebijakan uang ketat adalah kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga, menjual surat-surat berharga, dan lain sebagainya.

e. Politik Cadangan Kas (*Cash Ratio Policy*)

Politik cadangan kas adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara kas yang dimiliki oleh bank umum dengan pemberian kredit ke masyarakat. Bank sentral dapat menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada di bank-bank umum dengan tujuan agar kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dikendalikan.

Tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah untuk memastikan dan menjaga kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan *BI-7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)* sebagai alat kebijakan utama untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi, dengan tujuan akhir mencapai inflasi. BI7DRR merupakan kerangka operasional yang diterapkan oleh perbankan Indonesia guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia selalu memperbaharui

nilai BI7DRR setiap bulan. Nilai BI7DRR mempertimbangkan harga barang dan jasa di masyarakat. Jika keseluruhan harga barang dan jasa secara agregat meningkat (inflasi), maka nilai BI7DRR juga akan meningkat. Kenaikan harga agregat dinilai sebagai peredaran uang masyarakat yang terlalu banyak dibandingkan dengan produksi barang dan jasa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Bank Indonesia menaikkan nilai BI7DRR agar masyarakat dan bank umum tertarik untuk menanamkan dananya di Bank Indonesia. Dengan demikian, uang yang beredar di masyarakat berkurang dan diharapkan inflasi kembali turun (Nihayah & Rifqi I, 2022).

Ditinjau dari Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2022, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang dilaksanakan 18-19 Januari 2023 memutuskan untuk menaikkan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Keputusan menaikkan suku bunga tersebut merupakan langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan inflasi dan memastikan inflasi ini kembali ke sasaran $3,0\pm 1\%$ pada paruh kedua tahun 2023, serta memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamental akibat tingginya perang pasar keuangan global, ditengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi sebagai berikut:

- a. Memperkuat operasi moneter dengan menaikkan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke level sarannya.
- b. Memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
- c. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder (*operation twist*) untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investasi portofolio asing guna memperkuat nilai tukar rupiah, melalui kenaikan yield SBN tenor jangka pendek sejalan dengan kenaikan suku bunga BI7DRR dan kenaikan struktur yield SBN jangka panjang yang lebih rendah, dengan pertimbangan tekanan inflasi lebih bersifat jangka pendek dan akan menurun kembali ke sarannya dalam jangka menengah panjang.
- d. Mengimplementasikan instrumen operasi moneter (OM) valas berupa TD valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia.
- e. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan berfokus pada respon suku bunga perban6terhadap suku bunga kebijakan.
- f. Memperkuat sistem pembayaran dalam rangka menjaga momentum menjaga pemulihan ekonomi, dengan:
 - 1) Mendorong implementasi BI-FAST melalui perluasan kepesertaan BI-FAST baik melalui bank maupun Lembaga Selain Bank (LSB), kanal layanan serta implementasi layanan fase 1 tahap 2 (Bulak Credit, Direct Debit, dan *Request for Payment*);
 - 2) Mendorong implementasi dan sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik sesuai timeline pada tahun 2023;
 - 3) Melanjutkan perluasan implementasi QRIS melalui strategi 45 juta pengguna dan 1 miliar volume transaksi pada tahun 2023 serta pengembangan fitur QRIS dan QRIS antarnegara;
- g. Memperkuat kerjasama internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait. Selain itu, Bank

Indonesia bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan (BI, 2022).

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) akan terus diperkuat melalui efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan sektor Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan, mendorong penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor prioritas, dan ekspor serta meningkatkan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan hijau (BI, 2023).

Pertumbuhan ekonomi global semakin melambat dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Hal ini disebabkan masih berlangsungnya fragmentasi politik dan ekonomi serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara-negara maju. Koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi yang baru, menunjukkan penurunan yang signifikan dengan meningkatnya resiko resesi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Namun penghapusan Kebijakan Nol-Covid (*Zero Covid Policy*) di Tiongkok diprediksi akan membatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Secara keseluruhan, Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,3% dari sebelumnya sebesar 2,6% pada tahun 2023. Tekanan inflasi global tampaknya mulai berkurang seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, namun tetap didukung oleh harga energi dan pangan yang tinggi, rantai pasokan dan pasar tenaga kerja yang ketat, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Dengan menurunnya tekanan inflasi, perekonomian negara maju semakin mendekati puncak pengetatan kebijakan moneter dengan suku bunga yang diharapkan tetap tinggi di sepanjang tahun 2023. Ketidakpastian di pasar keuangan global juga diperkirakan akan mulai mereda yang berdampak pada pertumbuhan aliran modal ke negara-negara berkembang. Selain itu, tekanan pelemahan nilai tukar di negara-negara berkembang juga mulai berkurang (BI, 2022).

3. Dampak Strategi dan Kebijakan Moneter dalam Pengendalian Inflasi

Keputusan Bank Indonesia untuk meningkatkan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 6,50% berdampak pada penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Januari 2023 dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya.

Gambar 4
Perkembangan IHK Januari 2023



Menurut data BPS, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Januari 2023 mencatatkan penurunan sebesar 0,34% (mtm) dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang

sebesar 0,66% (mtm). Penurunan inflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan inflasi pada kelompok makanan yang fluktuatif dan harga yang diatur. Dengan perkembangan ini, inflasi IHK secara tahunan mencapai 5,28% (yoy), lebih rendah daripada bulan sebelumnya yang mencapai 5,51% (yoy). Perkembangan positif inflasi IHK ini dapat dicapai melalui koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi inti akan tetap berada pada kisaran $3,0\pm 1\%$ di semester I 2023 dan inflasi IHK akan kembali pada sasaran $3,0\pm 1\%$ di semester II 2023. Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan moneter dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan penurunan dan pengendalian inflasi (BI, 2023).

4. Analisis Kebijakan Moneter yang Diterapkan di Indonesia

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter dengan tujuan mencapai stabilitas nilai Rupiah, menjaga kestabilan sistem pembayaran, dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. "Stabilitas nilai Rupiah" dalam konteks ini merujuk pada stabilitas harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah.

Kestabilan nilai Rupiah melibatkan dua aspek utama, yaitu kestabilan harga barang dan jasa serta kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Keberhasilan mencapai kestabilan harga barang dan jasa dapat diukur melalui inflasi yang rendah dan tetap stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah diukur dari konsistensi nilai Rupiah terhadap mata uang asing. Memastikan inflasi rendah dan stabil serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah menjadi faktor penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil tidak dapat dipisahkan dari mencapai kestabilan nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia telah menerapkan kerangka kebijakan moneter yang dikenal sebagai *Inflation Targeting Framework* (ITF) sejak 1 Juli 2005, sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam kerangka tersebut, fokus utama adalah pada pengendalian inflasi. Bank Indonesia terus melakukan perbaikan kebijakan moneter untuk meningkatkan efektivitasnya dan mampu menghadapi perubahan dinamika dan tantangan ekonomi yang terus berkembang. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di Indonesia, Bank Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

ITF adalah sebuah kerangka kerja kebijakan moneter yang menetapkan kisaran target inflasi yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu dan diumumkan kepada publik untuk menunjukkan komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diterapkan melalui penggunaan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter, dan suku bunga pasar uang antarbank untuk jangka waktu overnight di Indonesia, yang dikenal sebagai *IndONIA* (*Indonesia Overnight Index Average*), digunakan sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini telah diberlakukan secara resmi sejak 1 Juli 2005.

Dengan menetapkan sasaran inflasi yang jelas dan mengumumkannya secara transparan, Bank Indonesia memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar tentang komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan membangun kepercayaan publik. Selain itu, melalui penerapan kerangka kerja yang konsisten dan transparan, Bank Indonesia meningkatkan akuntabilitasnya dalam menjalankan kebijakan moneter. Krisis keuangan global pada tahun 2008/2009 mengajarkan pentingnya fleksibilitas bagi bank sentral dalam merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran yang semakin kuat dari sektor

keuangan dalam mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan pengalaman tersebut, Bank Indonesia telah memperkuat kerangka ITF menjadi *Flexible* ITF.

Flexible ITF merupakan perkembangan dari kerangka kerja kebijakan moneter ITF yang mempertahankan elemen-elemen kunci ITF. Ini adalah kebijakan bank sentral yang memperkuat peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan tujuan mencapai stabilitas harga. Kerangka *Flexible* ITF didasarkan pada lima elemen utama sebagai berikut:

1. Strategi penargetan inflasi (*Inflation Targeting*) sebagai dasar kebijakan moneter.
2. Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mencapai stabilitas makroekonomi.
3. Peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.
4. Penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
5. Penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

Dalam keseluruhan, *Flexible* ITF merupakan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan (BI, 2023).

Untuk memastikan keberhasilan penerapan ITF, diperlukan kerangka pengaturan yang komprehensif dalam sektor keuangan yang disebut sebagai *macroprudential regulatory framework*. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi *Flexible* ITF dengan memperkuat mandatnya dalam menjaga stabilitas harga dan juga stabilitas sistem keuangan. *Flexible* ITF dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam mengintegrasikan kerangka stabilitas moneter dan sistem keuangan dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan, seperti kebijakan moneter, makroprudensial, nilai tukar, aliran modal, serta penguatan lembaga. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan peran koordinasi dan komunikasi kebijakan dalam mencapai stabilitas ekonomi yang kokoh dan terjamin.

Dalam kerangka strategi penargetan inflasi (*inflation targeting*), Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi untuk periode yang telah ditentukan. Sasaran inflasi tersebut ditetapkan oleh pemerintah dalam koordinasi dengan bank sentral melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang berlaku selama tiga tahun ke depan. Setiap periode, Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap proyeksi inflasi ke depan guna memastikan kesesuaian dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mengambil langkah pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan menetapkan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebagai suku bunga kebijakan yang menjadi indikator utama respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Keputusan ini merupakan bagian dari reformulasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan menggunakan BI7DRR sebagai suku bunga acuan, jangka waktu instrumen keuangan menjadi lebih pendek, sejalan dengan instrumen moneter 7 hari. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter dan mengarahkan inflasi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan BI7DRR sebagai bagian dari kebijakan moneter memiliki dampak langsung pada suku bunga deposito dan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Ketika Bank Indonesia meningkatkan BI7DRR, ini mengindikasikan penerapan kebijakan moneter yang ketat dengan tujuan mengendalikan inflasi melalui pengurangan permintaan agregat. Dalam hal ini, suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan cenderung naik. Dampaknya adalah menurunnya permintaan pinjaman dan pengeluaran konsumen, yang kemudian membantu mengurangi tekanan inflasi. Sebaliknya, ketika BI7DRR diturunkan, suku bunga kredit akan menurun. Ini mendorong peningkatan permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga. Penurunan suku bunga kredit juga mengurangi biaya modal bagi

perusahaan untuk melakukan investasi. Dampaknya adalah meningkatnya aktivitas konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perubahan BI7DRR memainkan peran penting dalam transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya terhadap suku bunga deposito dan suku bunga kredit, yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan agregat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, perubahan suku bunga BI7DRR juga mempengaruhi transmisi kebijakan melalui jalur nilai tukar. Jika BI7DRR meningkat, hal ini akan menciptakan selisih suku bunga yang lebih tinggi antara Indonesia dan negara lain. Dampaknya adalah mendorong investor asing untuk mengalokasikan modal mereka ke instrumen keuangan di Indonesia karena mereka dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal asing tersebut kemudian berpotensi meningkatkan nilai tukar Rupiah. Peningkatan nilai tukar Rupiah akan mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih murah, sementara harga barang ekspor menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif di pasar internasional. Hal ini dapat mendorong peningkatan impor dan penurunan ekspor. Dalam konteks ini, apresiasi Rupiah memiliki efek meredam inflasi.

Dengan demikian, perubahan suku bunga BI7DRR tidak hanya mempengaruhi suku bunga domestik, tetapi juga memiliki dampak pada nilai tukar Rupiah. Dalam situasi di mana BI7DRR meningkat, hal ini dapat menarik aliran modal asing dan menyebabkan apresiasi nilai tukar Rupiah, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tekanan inflasi melalui penurunan harga barang impor.

KESIMPULAN

Pemerintah menggunakan kebijakan moneter sebagai pengendali inflasi, yaitu stabilitas harga. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya mekanisme transmisi kebijakan moneter beserta instrument-instrumen yang digunakan. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank sentral menerapkan jalur transmisi kebijakan moneter terhadap inflasi di Indonesia melalui beberapa jalur kebijakan yang mengarah pada isu-isu jangka panjang yang dapat memberikan *multiplier effect*, diantaranya jalur suku bunga pinjaman, nilai tukar rupiah, kredit konsumsi, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Kebijakan Pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar diantaranya: 1) kebijakan diskonto (*Discount Policy*); 2) Politik pasar terbuka (*Open Market Policy*); 3) Politik Pembatasan Kredit (*Plafon Credit Policy*); 4) Politik Uang Ketat (*Tight Money Policy*); 5) Politik Cadangan Kas (*Cash Ratio Policy*). Sementara kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi adalah dengan menetapkan suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai instrument kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi.

Selain itu, terus diperkuatnya Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan sektor Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, MN, Dinda, AH, Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, SJ (2022). Metode penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: *Jurnal Pendidikan*, 6 (1), 947-980.
- Azalia, D. (2018). Analisis Hubungan Kausalitas dan Kointegrasi antara Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1981-2015 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Badan Pusat Statistik. 2023.
- Bank Indonesia. 2022. Tinjauan Kebijakan Moneter November 2022.
- Bank Indonesia. 2022. Moneter – Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2023. Berita Terkini (Siaran Pers) – Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2022. Pemerintah dan Bank Indonesia sepakati Lima langkah strategis menjaga inflasi 2022.
- Budihardjo, A., Wiradarmo, A. A., Ramadhanti, F., Saputra, I., Safriana, L., Kusmulyon, M. S.,... & Susila, W. R. (2023). *Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini: Seri 2 2022-2023*. Prasetiya Mulya Publishing.
- Fitriyani, E. (2023). Pengaruh Jalur Transmisi Kebijakan Moneter terhadap Inflasi di Indonesia. *Perspektif: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 21(1), 60-68.
- Hidayat, A. (2023). Pengendalian Inflasi Akan Membantu Selamatkan Daya Beli Masyarakat. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(1), 152-157.
- Sepihan, Asep. Peran Kebijakan Moneter Mengendalikan Inflasi
<https://kumparan.com/kabar-harian/jenis-jenis-kebijakan-moneter-untuk-mengatasi-inflasi-1xlfG10OGCV>
- INDEF, 2023. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2022.
- Mahendra, A. (2016). Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga sbi dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1-12.
- Nihayah & Rifqi I. 2022. Analisis Indikator Makro Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(10), 18-30.
- Nugroho, M. F., & Utomo, Y. P. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Masyarakat, Jumlah Uang Beredar, serta Nilai Tukar Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 1997-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 822-825.
- Santosa, AB (2017). Analisis Inflasi di Indonesia.
- Triwahyuni. 2021. Pengendalian Inflasi, Moneter, dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6 (2).
- Warjiyo, P. (2017). Kebijakan moneter di indonesia (Vol. 6). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Yuniati, M., & Amini, R. (2020). Analisis Dampak Covid-19 terhadap Daya Beli Masyarakat NTB. *MPU Procuratio*, 2(2 Desember), 362-368.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)